

***Collaborative Governance* Dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang**

Fairuz Shafa Salsabila¹, R. Slamet Santoso²

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Kec. Tembalang, Semarang.
Faksimile (024) 7465405

Email : fairuzshafa@students.undip.ac.id

Abstrak

Kemajuan dan perkembangan masyarakat di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai sektor kehidupan global, salah satunya yaitu dampak kualitas sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh *stunting* berupa ketidakefektifan produktivitas seseorang karena rendahnya kemampuan kognitif akibat malnutrisi pada masa awal pertumbuhan. Konteks penanganan masalah publik dengan *collaborative governance* biasanya berupa kendala yang sulit diselesaikan oleh satu pihak saja. Unsur utama proses *collaborative governance* yaitu keterlibatan peran multi-stakeholder dalam pengaturan pengentasan suatu permasalahan publik. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan *collaborative governance* dalam upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang agar memajukan kualitas masyarakatnya. Penelitian ini memiliki metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini berfokus pada implementasi *collaborative governance* pada upaya penanganan *stunting* yang solutif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan empat fenomena, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan situasi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas yang membutuhkan banyak bantuan, telah terdapat *collaborative governance* dalam upaya menangani *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dengan koordinasi, distribusi dan pengelolaan bantuan dari multi-aktor berupa *pentahelix* (pemerintah, perusahaan, akademisi, media, dan masyarakat) yang cukup baik. Salah satu bentuk solusi dalam penanganan *stunting* oleh *collaborative governance* yakni upaya pemberdayaan masyarakat sebagai langkah perubahan perilaku positif. Rekomendasi sebagai strategi dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas adalah penyediaan infrastruktur sebagai sarana optimalisasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan penambahan pengawasan Posyandu untuk perbaikan kesenjangan pendataan sebagai langkah perbaikan kualitas sumberdaya manusia bagi keberlangsungan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative*, Penanganan, *Stunting*

PENDAHULUAN

Tantangan utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif pada suatu bangsa adalah permasalahan gizi dalam kesehatan masyarakatnya. Permasalahan gizi pada suatu kelompok tertentu dapat berpengaruh pada status gizi periode siklus kehidupan berikutnya, misalnya wanita yang produktif dalam reproduksi (Maflahah, 2019), karena penentuan kualitas sumber daya manusia diawali dari kondisi ibu pada masa kehamilan (Ekayanthi, 2019). Kondisi permasalahan gizi (malnutrisi) dibagi menjadi 3, yaitu *stunting*, *wasting*, dan *overweight*. Berdasarkan data malnutrisi anak pada *Joint Child Malnutrition Estimates Key findings of the 2021 edition*, ditemukan bahwa permasalahan gizi terbanyak adalah *stunting* dengan angka terbanyak malnutrisi berada di Asia. *Stunting* adalah salah satu narasi status kekurangan gizi kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal kehidupan. *Stunting* merupakan kondisi kekurangan gizi kronis terhitung dari usia seribu hari pertama kehidupan anak (Mauludiyah, dkk, 2020). Kekurangan gizi ditinjau dari kurangnya kualitas, volume, hingga variasi asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu selama masa kehamilan. Faktor lain yang menunjang adalah pola asuh, tingkat kesehatan anak, kondisi sosio-ekonomi dan kondisi lingkungan hidup. Dampak *stunting* pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak adalah

ketidakefektifan produktivitas ketika dewasa karena masalah perkembangan kemampuan kognitif pada awal pertumbuhan (Alderman, 2019).

Pengentasan *stunting* menjadi topik hangat dunia internasional karena menjadi bagian dari strategi visioner pembangunan global PBB berupa *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sejumlah 17 target terkandung dalam SDGs yang salah satunya berupa SDGs *Zero Hunger* pada target nomor dua. Landasan *Zero Hunger* dalam keberperanan untuk mengurangi *stunting* yaitu :

Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai, pada tahun 2025, target yang disepakati secara internasional untuk *stunting* dan *wasting* pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil dan menyusui serta manula (*Zero Hunger 2015-2030*)

Kondisi *stunting* di Indonesia adalah permasalahan gizi utama. Data prevalensi balita *stunting* menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia menempati urutan keempat pada kasus *stunting* di dunia dengan angka mencapai 27,67% (*kompas.com*, 2021). Perbedaan data tercatat pada situs *Goalkeepers by gatesfoundation.org* yang mencatat bahwa tingkat *stunting* Indonesia pada tahun 2019 mencapai 32%. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dimana prevalensi *stunting*

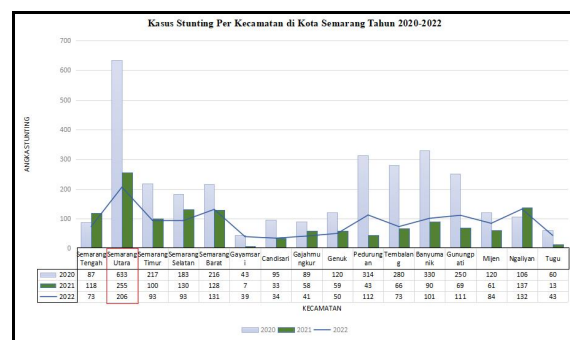
di Indonesia turun di tahun 2022 berjumlah 21,6%, diikuti pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) yang menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 115 dari 151 negara dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi secara global.

Berkaitan dengan upaya pengentasan *stunting*, Pemerintah Pusat di Indonesia telah menyusun target prevalensi *stunting* pada balita sejumlah 14% pada tahun 2024, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Indonesia yang integratif melalui koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan. Perencanaan pengentasan *stunting* telah masuk dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Melihat kesenjangan dalam prevalensi *stunting* di berbagai daerah sesuai data SSGI (2022), kemajuan peningkatan penurunan *stunting* untuk mencapai angka 14% pada tahun 2024 akan dirasa sulit. Pengentasan *stunting* dimulai dengan lingkup yang wilayah yang kecil memerlukan data konkret berupa kuantitas asli *stunting* yang tidak hanya berdasarkan prevalensi persentase jumlah balita dengan jumlah balita yang mengalami *stunting*. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengukur upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan *stunting* berdasarkan jumlahnya. Pengukuran berdasarkan jumlahnya dapat mempengaruhi baik atau buruknya suatu

kondisi, namun pemusatan upaya perbaikan yang dapat dilakukan harus sesuai dengan kondisi kuantitas populasi yang lebih besar atau jumlah sangat memengaruhi perbedaan upaya perbaikan tersebut karena suatu *item* yang diukur tidak dapat dipukul rata.

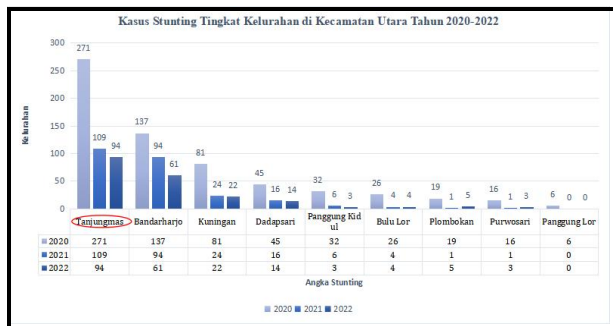
Regulasi turunan dari Perpres No. 72 Tahun 2021 di Kota Semarang berupa Perwali No. 45 tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang menunjukkan penurunan kewenangan kota/kabupaten untuk menyusun programnya masing-masing untuk menurunkan angka *stunting*. Berdasarkan data jumlah *stunting* tahun 2020-2022 di wilayah Kota Semarang, ditemukan kesenjangan di wilayah kecamatan, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Data Perbandingan Jumlah Stunting Per Kecamatan di Kota Semarang (2020-2022)

Interpretasi data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023, diolah), menyebutkan bahwa permasalahan muncul karena adanya kesenjangan, yakni tingginya jumlah balita *stunting* selama 3 tahun berturut-turut di Kecamatan Semarang Utara. Angka

kelahiran tertinggi pada tahun 2020 berada di Kecamatan Tembalang sejumlah 13.090; tahun 2021 berada di Kecamatan Semarang Barat sejumlah 4.169; kemudian tahun 2022 berada di Kecamatan Tembalang sejumlah 10.911.



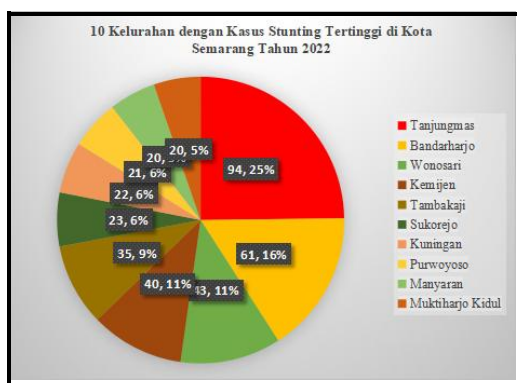
Gambar 1.2 Data Perbandingan Jumlah Stunting Tingkat Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara (2020-2022)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang (2023, diolah), jumlah *stunting* per kelurahan yang terdapat di Semarang Utara selama 3 tahun terakhir (2020-2022), jumlah *stunting* pada kelurahan Tanjung Mas masih lebih tinggi dibanding dengan kelurahan lainnya, meskipun telah terdapat penurunan.

Sejak ditandatanganinya Perpres No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia dan Peraturan BKKBN RI No. 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, terdapat perintah pemberlakuan tugas untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting, serta penyusunan regulasi turunan untuk wilayah tingkat kota/kabupaten. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan upaya untuk

menangani *stunting* pada tahun 2021 meninjau tingginya prevalensi stunting di Kelurahan Tanjung Mas di tahun 2020 dengan menetapkan lokus *stunting*, yakni Pilot Project di Kelurahan Tanjung Mas pada tahun 2021 dengan regulasi pelaksanaan berupa SK Walikota No. 050/365/V/2021 berupa Penetapan Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan *Stunting*, serta SK Walikota No. 050/405/2021 sebagai Pembentukan TPK dan TKKPS Kota Semarang. Pilot Project di Kelurahan Tanjung Mas merupakan awal kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas sebagai kontribusi intervensi berupa spesifik dan sensitif. Seluruh *stakeholder* yang tergabung dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas berbentuk *Pentahelix* (pemerintah, perusahaan, akademisi, media, masyarakat). Keberlanjutan kolaborasi penanganan stunting di Kelurahan Tanjung Mas ditahun selanjutnya berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang, berupa SiBening (Semua Ikut Bergerak Bersama Menangani *Stunting*); program Dapur Dashat (Dapur Sehat Atasi *Stunting*) di 16 kecamatan Kota Semarang; Rumah Gizi; dan Rumah Penanganan *Stunting* Lintas Sektor bagi Baduta (Rumah Pelita). Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan Kota Semarang kedepannya menjadi *zero stunting*.

Meninjau adanya upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas sebelum tahun 2022, pendataan masih menyebutkan bahwa Kelurahan Tanjung Mas memiliki jumlah *stunting* paling banyak di Kota Semarang. Berikut adalah perbandingan persentase jumlah *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dengan 9 kelurahan dengan jumlah terbanyak di Kota Semarang:



Gambar 1.1 Data 10 Kelurahan dengan Kasus Stunting Tertinggi di Kota Semarang

Sumber : Dinkes Kota Semarang Tahun 2023, diolah

Temuan terbaru terkait permasalahan *stunting* di Kota Semarang disebutkan pada Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang, bahwa meninjau bagian penjelasan regulasi, salah satu permasalahan *stunting* yang harus diperhatikan yaitu kedatangan balita ke posyandu untuk mengalami penimbangan dan pengukuran masih sebesar 44% setiap bulannya di Kota Semarang, sehingga menyebabkan masih ada

balita yang tidak dipantau tumbuh kembangnya secara rutin.

Berdasarkan temuan lapangan Kelurahan Tanjung Mas bahwa terdapat upaya kolaborasi secara eksklusif untuk penanganan banyaknya kasus *stunting*, namun ditemukan beberapa permasalahan pada upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas yang dapat dikaitkan sebagai permasalahan kolaborasi.

Pemangku kepentingan yang cenderung kurang ikut berpartisipasi dengan baik pada kolaborasi adalah masyarakat, akademisi, dan media. Masyarakat kurang dapat berpartisipasi dalam kolaborasi dikarenakan keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran, sehingga memerlukan pihak pemerintah atau swasta untuk mengundang kurangnya peran partisipasi dalam pihak tersebut (Trisniati, et al, 2021). Permasalahan selaras ditemukan dalam kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, disimpulkan dari wawancara kepada Kepala Sekbid Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, Pegawai Penanganan Gizi Puskesmas Bandarharjo dan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Kota Semarang pada tahun 2023, koordinasi kolaborasi dari perusahaan, akademisi, media, serta partisipasi masyarakat yang kurang maksimal karena rendahnya kesadaran masyarakat. Dibuktikan dengan adanya masyarakat yang masih cenderung memandang sebelah mata upaya penanganan *stunting* dan banyaknya jumlah ketidaksiapan

pernikahan hingga pernikahan anak selain jumlah stunting di Kelurahan Tanjung Mas yang belum menemui data yang akurat akibat kesenjangan partisipasi masyarakat dalam menghadiri Posyandu setiap bulannya berdasarkan temuan observasi serta penegasan pada penjelasan Perwal No. 45 Tahun 2023. Kesadaran masyarakat akan partisipasi yang rendah tersebut diimbangi dengan kurangnya sumber daya pendanaan dan keterbatasan infrastruktur untuk menangani stunting berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pelaksanaan permasalahan stunting berupa Dapur Sehat, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga, dan implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku pada tahun 2022.

Candriasih, dkk (2021) berpendapat bahwa permasalahan stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, sehingga membutuhkan penanganan multisektor berupa kolaborasi. Government of Canada (dalam Rudi, 2021) menyebutkan bahwa terhambatnya kolaborasi dapat dikarenakan kurangnya inovasi dari para pemimpin untuk mencapai tujuan politik yang kompleks. Sesuai kesimpulan dengan wawancara dari Lurah Tanjung Mas, Kepala Sekbid Kesehatan Masyarakat Kota Semarang, dan perwakilan akademisi Konsultan Gizi Online DIG UNDIP, (2023), Kelurahan Tanjung Mas merupakan wilayah dengan permasalahan kompleks dengan kondisi

lingkungan masyarakat yang kurang mendukung perubahan perilaku, serta faktor alam yang sulit ditangani mengakibatkan sulitnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan sanitasi. Permasalahan Tanjung Mas yang kompleks tersebut belum menemukan inovasi yang optimal dalam keberjalanan kolaborasi penanganan stunting untuk mengatasi penyebab banyaknya stunting.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait kolaborasi *multi-aktor* untuk penanganan *stunting* di kelurahan Tanjung Mas di Kota Semarang dengan Judul **“Collaborative Governance dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang”**

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana model *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan identifikasi dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar

belakang. Tujuan penelitian mengikuti kerangka identifikasi sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan model *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang
2. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Administrasi Publik

Administrasi adalah sebuah upaya kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Pasolong, 2014). Publik didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kesamaan pikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik sesuai dengan nilai dan norma yang dimiliki (Syafiie, 2010) .

Berdasarkan pendapat *Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro* (dalam Syafiie, 2010), administrasi publik merupakan suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang

merupakan bagian dari proses politik. Caiden (dalam Hardi, 2020) menandakan bahwa disiplin administrasi publik memiliki hakekat untuk menanggapi persoalan masyarakat dan manajemen usaha masyarakat. Administrasi publik sangat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta maupun secara individual dalam pelayanan kepada masyarakat.

Paradigma Governance

Gibson (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017) mengamati bahwa terdapat banyak bentuk paradigma *governance* yang di dokumentasikan dalam literatur sebagai tata kelola. Setiap model mengusulkan penekanan yang berbeda, baik kurang atau lebih bergantung pada konteks lokal. Terdapat 4 model *governance* dalam konsep tata Kelola, diantaranya : 1) *Governance as Government*; 2) *Good Governance*; 3) *Governance as Good Enough Governance*, dan 4) *Collaborative, Partnership, Network Governance*.

Kajian *Collaborative Governance* dalam studi Administrasi Publik mengacu pada model *Governance* ke-4 berupa *Collaborative, Partnership, and Network Governance* yang menggaris bawahi bahwa pemerintahan sebagai keterlibatan eksternal menekankan pada salah satu prinsip, yakni jaringan institusi aktor dari dalam dan diluar pemerintah sebagai fungsi jaringan, kemitraan, dan kolaborasi.

Manajemen Publik

Menurut *Overman* (1984), manajemen publik merupakan sebuah penelitian interdisipliner dalam organisasi dan merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian fungsi manajemen. Sebagai bagian dari administrasi publik, manajemen public diartikan sebagai ilmu dan seni yang berintikan metodologi terapan untuk merancang program program administrasi publik, restrukturisasi organisasi, kebijakan dan perencanaan manajerial, alokasi sumberdaya, sistem penganggaran, pengelolaan finansial, manajemen SDM, masalah audit serta evaluasi.

Agronoff dan *McGuire* (dalam Kapucu, 2010) mendefinisikan manajemen publik secara kolaboratif adalah konsep yang menggambarkan proses pengoperasian yang memfasilitasi pengaturan multi-organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh satu organisasi.

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-Negara dalam proses pengambilan keputusan bersama yang sifatnya musyawarah di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif dengan

tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik atau aset (*Ansell dan Gash, 2008*).

O'Leary dan *Bingham* (dalam Sudarmo, 2015) berpendapat bahwa kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian.

Berdasarkan pada pendapat beberapa ahli tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa *Collaborative Governance* adalah konsep tata kelola kolaboratif dari pemerintah, aktor privat, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program publik sebagai pemecahan permasalahan yang sulit atau tidak dapat dipecahkan oleh banyak aktor sendirian. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan aktor publik yaitu pemerintah dan aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan bukanlah suatu yang terpisah melainkan bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

1. Model Collaborative Governance

Model *collaborative governance* yang dijadikan referensi pada penelitian menurut *Ansell dan Gash* (dalam Hardi, 2018) menggunakan empat fenomena

sebagai variabel *collaborative governance* sebagai berikut:

1) Kondisi Awal

Kondisi di awal terjadi pada awal kolaborasi atau sebelum kolaborasi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan.

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk kepada legitimasi secara prosedur dalam proses kolaborasi yang menekankan pada bagaimana aturan main dalam partisipasi, pembentukan forum, kejelasan regulasi, dan transparansi proses.

3) Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan yang dibutuhkan harus dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan sebagai diandalkan apabila terdapat perselisihan untuk sebagai mediator serta memfasilitasi tim dalam *stakeholders* untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pengaturan pada kolaborasi.

4) Proses Kolaboratif

Suatu kolaborasi memerlukan tahapan bagi beberapa pihak yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pada

implementasinya, proses kolaborasi merupakan sebuah siklus yang berulang-ulang dari interaksi antar pihak terikat kolaborasi demi mencapai inti dari kolaborasi. Proses kolaborasi memerlukan komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman, dan hasil.

2. Faktor Pendukung dan Faktor

Penghambat *Collaborative Governance*

Penyelesaian masalah konsep *collaborative governance* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi fokus signifikan dalam perbaikan berupa faktor pendukung dan penghambat untuk menjadi tolak ukur keefektivitasan kolaborasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septiani (2021), terdapat 3 faktor yang dapat diidentifikasi sebagai indikator untuk faktor pendukung dan faktor penghambat pada *collaborative governance* sesuai dengan pendapat-pendapat dari ahli sebagai berikut :

1) Faktor Struktur Sosial

Campbell (dalam Septiani, 2021) menjelaskan bahwa pengaruh kolaborasi di antara jaringan sosial, norma timbal balik, serta kepercayaan yang muncul dari mereka. Jabrohim (dalam Rafiq, 2020) menjelaskan bahwa struktur sosial memiliki komponen

masyarakat yang merupakan sistem sosial yang terkait satu sama lainnya untuk bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan

2) Faktor Kultural

Kaner (dalam Septiani, 2021) bahwa pelaksana, pemimpin dan fasilitator harus mencontohkan komitmen untuk belajar dan mengadopsi keterampilan kolaboratif dengan berkomunikasi secara otentik dan sabar menggerakkan kelompok. *McCarthy* (dalam Wright, 2006) pada *A culture of Collaboration*, menarasikan bahwa efektivitas dalam dialog masyarakat yang efektif akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat yang harus terjadi dalam budaya kolaborasi.

3) Faktor Kepentingan Pemerintah

Sudarmo (dalam Septiani, 2021) dijelaskan bahwa perubahan kesepakatan yang telah disetujui diawal kesepakatan kerjasama akibat adanya kepentingan baru yang berbeda-beda dari masing-masing pemangku kepentingan dapat menghambat proses kolaborasi tersebut sehingga harus terdapat konsistensi dari kesepakatan. Kepentingan

pembuatan kebijakan dari pemerintah harus selaras dengan kepentingan politik antar para pemangku kepentingan yang dapat diperoleh dengan desentralisasi akses terhadap kekuasaan kepada para pemangku kepentingan dalam kolaborasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki jenis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Situs penelitian ini berada di Kelurahan Tanjung Mas dengan lokus penelitian berada di Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive-sampling*, serta pengujian kredibilitas penelitian menggunakan triangulasi sebagai pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahap awal dalam membentuk relasi dari pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan untuk melaksanakan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kondisi awal kondisi kolaborasi selanjutnya di antara pemangku kepentingan. Kondisi awal

kolaborasi memiliki hasil berupa dukungan keberlangsungan kolaborasi selanjutnya dari banyaknya atensi dari multi-aktor.

Sejarah awal kolaborasi berupa kerjasama dan konflik penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas adalah sejak munculnya perintah dari pusat bahwa seluruh sektor harus terlibat di tahun 2020 di setiap wilayah berupa Perpres No. 72 Tahun 2021. Pemilihan *Pilot Project* pada tahun 2021 disebabkan banyaknya data *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dan keterbatasan anggaran perubahan Kota Semarang. *Pilot Project* dijadikan contoh penanganan *stunting* dengan pemberian PMT selama 3 bulan di Kelurahan. Sesuai pernyataan informan yang ditemukan, beberapa kolaborasi *Pilot Project* Kelurahan Tanjung Mas, antara lain: Disdalduk KB Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam pemberian PMT kepada anak *stunting* dan ibu hamil KEK; DP3A Kota Semarang dan Kemenag aktif melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak dan *assesment* terhadap pasangan pernikahan anak; CSR perusahaan, pemerintah, dan kader Kelurahan Tanjung Mas; terakhir adalah akademisi dan Puskesmas Bandarharjo dalam pemberian bantuan berupa pengabdian masyarakat. *Stakeholder* non pemerintah yang ikut berkolaborasi pada *Pilot Project* Kelurahan Tanjung Mas antara lain : PT. Indonesia Power, PT. Pertamina, PT. Angkasa Pura, IZI, IDII, Undip, Upgris, dan Unnes.

Konflik yang terjadi selama *Pilot Project* Kelurahan Tanjung Mas yaitu adanya penolakan dari beberapa masyarakat untuk memperbaiki hidupnya dan beberapa masyarakat yang masih belum percaya dengan adanya *stunting* sehingga menolak mengakui bahwa anaknya terkena *stunting*.

Kondisi ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pada kondisi awal kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas berupa kurangnya akses makanan, pengetahuan *stakeholder* yang tergabung untuk menuntaskan masalah, dan infrastruktur penanganan *stunting* yang tidak mengakomodasi Kelurahan Tanjung Mas.

Dorongan dan kendala partisipasi awal kolaborasi yang ditemukan adalah dorongan partisipasi kolaborasi berupa upaya penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas karena pendataan jumlah *stunting* Kelurahan Tanjung Mas yang menempati urutan teratas karena kompleksnya permasalahan wilayah, sedangkan kendala partisipasi kolaborasi dikarenakan kurangnya pendanaan, kurangnya komitmen partisipasi masyarakat serta kader, serta belum teratasinya kompleksitas permasalahan wilayah Kelurahan Tanjung Mas. Permasalahan multidimensional pada wilayah Kelurahan Tanjung Mas berupa wilayah pesisir, banjir, dan rob yang melahirkan lingkungan sosial yang belum baik.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan tahapan terkait penggunaan regulasi dasar sebagai rujukan kolaborasi sebagai bentuk legitimasi secara prosedural. Penekanan unsur desain kelembagaan adalah cara kerja berpartisipasi, pembentukan forum, kejelasan legitimasi aturan secara prosedural serta pembuktian transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi.

Desain kelembagaan *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas disimpulkan cukup baik mengingat kejelasan aturan dasar keterlibatan *stakeholders* dalam kolaborasi penanganan *stunting* yang diwujudkan dalam fokus intervensi pada kelurahan di Kota Semarang, Rembuk *stunting* diwujudkan secara inklusif, forum kolaborasi yang eksklusif dibuktikan dengan kolaborasi penanganan *stunting* di kelurahan Tanjung Mas terintegrasi dengan SiBening Kota Semarang. Akan tetapi, terdapat *gap* yang tinggi pendataan Posyandu yang berbasis partisipasi masyarakat serta laman resmi Kota Semarang yang belum memunculkan perbaruan regulasi yang telah disahkan.

Aturan dasar yang jelas dibuktikan dengan regulasi utama kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas adalah kaitan regulasi Keputusan Walikota Semarang No. 050/209 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi *Stunting* di

Kota Semarang Tahun 2022 mengacu pada Perpres No. 72 Tahun 2021 dan Peraturan Walikota No. 45 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang. Seluruh pihak yang berkolaborasi memiliki aturannya masing-masing, yakni CSR dengan Perda PKBL, kewajiban akademisi menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta penandatanganan nota kesepahaman dari berbagai organisasi maupun yayasan terlibat.

Inklusivitas partisipan dalam kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dibuktikan dengan Rembuk *Stunting* yang diselenggarakan turut mengundang seluruh *stakeholder* termasuk masyarakat. Rapat selanjutnya adalah keterlibatan lintas sektor oleh TPPS, pemerintah, OPD, CSR, hingga seluruh *stakeholders* untuk membahas regulasi yang diatur pada Rembuk *Stunting*, seperti teknis program, bentuk kegiatan, hingga kesepakatan untuk pendanaan

Eksklusivitas forum pada *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas diwujudkan gabungan *Penta-Helix* (pemerintah, perusahaan, akademisi, media, dan masyarakat) wilayah kelurahan dengan ruang kolaborasi penanganan *stunting* lingkup Kelurahan Tanjung Mas dan SiBening Kota Semarang.

Transparansi proses kolaborasi didasarkan atas adanya pelaporan ke pihak atasan, pengawasan secara berkala oleh yang berkewajiban, dan

adanya *website* untuk memberi info kepada masyarakat terkait dinamika *stunting* serta kejelasan kegiatan atau program yang dilakukan. Kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung mas sejauh ini masih ditemukan belum adanya pembaharuan regulasi yang telah disahkan pada laman resmi Kota Semarang terkait penanganan *stunting* serta pendataan *stunting* di Posyandu Kota Semarang yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 44%.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan diharuskan membawa *stakeholders* ke dalam satu komitmen sebagai keterlibatan pengaruh untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Dibutuhkan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan diandalkan untuk menjadi fasilitator dan mediator bagi pihak lain apabila terjadi kondisi perbedaan pendapat hingga perselisihan dalam kolaborasi.

Kepemimpinan fasilitatif pada *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dinilai cukup baik dari fungsi fasilitasi yang dijalankan pemerintah kota dan pemerintah perangkat kelurahan Tanjung Mas dalam mengelola banyaknya bantuan yang hadir, fungsi mediasi dilakukan oleh Bappeda Kota Semarang sebagai koordinator TPPS, Lurah Tanjung Mas sebagai opsi mediator dari *stakeholder* non TPPS yang ingin menerjunkan bantuan

langsung dibantu oleh Ketua PKK untuk mediasi atas bantuan yang datang sebagai pemahaman penerimaan kepada kader dan masyarakat, terakhir, fungsi pemberdayaan yang dihadirkan oleh kepemimpinan meninjau keterlibatan Lurah dan Ketua PKK untuk menggerakkan pemberdayaan melalui kader masyarakat. Kelemahan kepemimpinan yang belum ditemukan adalah rutinitas bantuan yang selaras dari tiap *stakeholder* sehingga belum optimal untuk penurunan *stunting*.

Fungsi fasilitasi telah dijalankan dari pemerintah kota serta pemerintah kelurahan yang berdampak pada banyaknya bantuan yang diterima dari non TPPS di Kelurahan Tanjung, namun belum ditemukan rutinitas bantuan selaras oleh *stakeholder* non TPPS yang diterjunkan, karena jenis bantuan yang diterjunkan oleh 1 pihak di tahun selanjutnya akan berbeda dengan bantuan sebelumnya sehingga dampak yang ditimbulkan tidak dapat dilihat secara maksimal.

Fungsi mediasi dalam kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas berupa peran utama dari Bappeda Kota Semarang sebagai bidang koordinasi, konvergensi, dan perencanaan yang mengharuskan menghadapi kesepakatan antar pemangku kepentingan, serta peran mediasi Lurah berlaku kepada seluruh kegiatan yang berpusat di Kelurahan Tanjung Mas dengan pihak luar, sedangkan Ketua PKK Kelurahan Tanjung Mas menjadi mediator untuk membawahi keberjalanan

kader dengan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas.

Pemberdayaan masyarakat dalam fungsi kepemimpinan kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas berupa aktivitas Lurah yang bekerjasama dengan ketua PKK untuk menggerakkan seluruh kader *stunting* di kelurahan agar aktif bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan pendampingan dan sosialisasi di awal pernikahan hingga proses kehamilan, serta keberhasilan posyandu di setiap bulannya.

Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi diartikan sebagai bentuk representasi dari interaksi antar pihak *stakeholders* dalam pelaksanaannya yang berupa siklus karena prosesnya akan selalu berulang-ulang untuk mencapai tujuan inti kolaborasi. Proses kolaborasi dimulai dari Dialog Tatap Muka, berlanjut pada Pembangunan Kepercayaan, Komitmen Pada Proses, Berbagai Pemahaman, dan Hasil Antara.

Proses kolaboratif *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas yang dinilai cukup baik dari sisi dialog tatap muka dengan adanya pertemuan lintas sektor sebagai bentuk komunikasi mendalam berupa koordinasi teknis dari Rembuk *Stunting*; pembangunan kepercayaan dari pemerintah melalui Stranas *Stunting*,

stakeholders TPPS maupun non TPPS; dan arah keberlanjutan perencanaan strategis Strakom berupa KAP untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat Kelurahan Tanjung Mas.

1. Dialog tatap muka kolaborasi penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dinilai dengan adanya pertemuan Lintas Sektor untuk pembahasan perencanaan serta evaluasi keberjalanan *stakeholders* bersama kader-kader.
2. Pembangunan kepercayaan dari *stakeholders* selain masyarakat telah baik, sedangkan dari kader, termasuk masyarakat Kelurahan Tanjung Mas belum dapat dilaksanakan dengan baik serta menyangkut tidak lengkapnya pendataan *stunting*.
3. Komitmen dalam proses kolaborasi dari sisi partisipasi masyarakat kurang baik, seperti pendataan pada Posyandu yang tidak lengkap serta kurangnya pengawasan pada pendataan menimbulkan ketidakakuratan yang tinggi pada data.
4. Pemahaman bersama berupa identifikasi permasalahan menyangkut peranan *stakeholders* kolaborasi penanganan *stunting* disimpulkan bahwa kurang efektifnya implementasi dukungan kegiatan kader *stunting* dalam mengatasi penyebab *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, berupa minimnya konsumsi tablet tambah darah dan sanitasi buruk

5. Hasil antara yang didapat pada *small win* belum jelas karena selain hasilnya dapat terlihat setelah bertahun-tahun, juga adanya kesenjangan dalam pendataan yang didapat pada Posyandu, yakni partisipasi Posyandu hanya mencapai angka 44% di seluruh Posyandu Kota Semarang.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Faktor Struktur Sosial

Struktur sosial menggambarkan konseptual suatu keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lain berupa jaringan, interaksi antara orang-orang serta timbal balik berupa kepercayaan yang muncul dari kolaborasi. Struktur sosial berkaitan tentang struktur perencanaan, struktur tugas dan fungsi *stakeholder* sehingga menjelaskan hubungan kolaborasi (Septiyani, 2021).

Faktor struktur sosial pada *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas cukup baik pada struktur jaringan karena keterlibatan desentralisasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, serta keterlibatan kolaborasi dengan *stakeholder* non TPPS sehingga terdapat banyak bantuan masuk demi mencapai target *zero stunting*. Kepercayaan dalam struktur sosial masih ditemukan

kurangnya pembangunan kepercayaan dari sisi kader *stunting*, seperti PKK dan Posyandu untuk mengupayakan optimalisasi komitmen dari masyarakat mewujudkan keterlibatan pengentasan *stunting* yang maksimal.

Struktur jaringan merupakan faktor yang mendukung *collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Tanjung Mas karena keterlibatan *stakeholder* dengan *stakeholder* lainnya cukup terhubung dengan adanya desentralisasi dalam pengambilan keputusan dimana para *stakeholder* ini saling bertalian dalam upaya mengentaskan *stunting* sehingga apabila dapat diimplementasikan secara maksimal dapat memudahkan pencapaian pengentasan *stunting*.

Kepercayaan menjadi faktor pendukung dari sisi Pemerintah pusat dengan regulasi utama, Stranas *Stunting* serta koordinasi ke bawah melalui Bappeda wilayah. Faktor penghambat ditemukan pada pembangunan kepercayaan pada sisi kader seperti PKK dan posyandu yang bertugas menginformasikan program serta sebagai penguat solutif bagi masyarakat naungan DP3A Kota Semarang masih ditemukan masyarakat yang sulit menghadiri mediasi *stunting*, sulit menghadiri agenda Posyandu, serta banyak masyarakat meremehkan tablet tambah darah saat hamil.

Faktor Kultural

Faktor budaya berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari budaya kerjanya. Komunikasi dan partisipasi turut menjadi pengukuran pada faktor kultural. Dalam ilmu sosial, kultur diartikan sebagai pola perilaku yang diwariskan secara sosial melalui interaksi sosial, bukan pola interaksi yang diwariskan secara biologis (Marzali, 2014). Demi menciptakan kolaborasi yang efektif maka para pelayan publik harus memiliki kemampuan dan kerelaan untuk melebur masuk ke kemitraan secara pragmatic berorientasi pada hasil (Sepriandi dan Hussein, 2019).

Faktor SDM telah cukup baik dari *stakeholder* non masyarakat dari TPPS, perusahaan, akademisi, dan pihak lainnya. Kondisi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas sedikit membaik karena telah dilakukan melalui sosialisasi secara berkala oleh para kader *stunting*. Faktor komunikasi kolaborasi cukup baik dengan adanya interaksi bersifat purposif dan informatif yang tidak kaku, terlihat dari keterbukaan Lurah Tanjung Mas yang tidak mengharuskan prosedur yang berbelit-belit untuk pihak yang datang untuk menerjukkan bantuan.. Komunikasi kolaborasi secara internal dari kader dan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas dipimpin oleh Ketua PKK. Faktor partisipasi kolaborasi dari sisi TPPS dan *stakeholder* non masyarakat telah cukup baik sesuai dengan kepentingannya

masing-masing, yakni CSR sebagai tanggung jawab moral perusahaan dan akademisi untuk kepentingan Tri Dharma Perguruan Tinggi disesuaikan dengan pemetaan permasalahan lokasi.

Faktor kultural pada SDM kelompok sasaran menjadi faktor penghambat yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi yang rendah berdampak pada kurangnya kesadaran akan gizi dari masyarakat dan pola asuh yang buruk. Faktor kultural dari budaya kolaborasi dari *Stakeholder* non masyarakat rata-rata telah mumpuni dalam berpendidikan menjadi faktor pendukung sehingga sedang berusaha untuk mengentaskan permasalahan yang kompleks di Kelurahan Tanjung Mas dengan upaya perbaikan kualitas SDM masyarakat Kelurahan Tanjung Mas melalui edukasi dan pelatihan tentang gizi dan pola asuh secara intensif.

Komunikasi yang terjalin diantara para *stakeholder* menjadi faktor pendukung yang ditandai dengan adanya interaksi bersifat purposif dan informatif, terlihat dari keterbukaan Lurah Tanjung Mas yang tidak mengharuskan prosedur yang berbelit-belit untuk pihak yang datang untuk menerjukkan bantuan, tidak harus menghubungi Bappeda Kota Semarang. Komunikasi secara internal dari kader dan masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas dipimpin oleh Ketua PKK sekaligus menjadi mediator, terdapat rutinitas rapat untuk membahas pelaporan dinamika

stunting serta kondisi ibu hamil KEK di Kelurahan Tanjung Mas

Partisipasi faktor kultur *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas menjadi faktor pendukung dari segi tugas utama pemerintah dalam TPPS Kota Semarang dan keterlibatan penerjunan bantuan ring 1 CSR yang rutin dan akademisi disesuaikan oleh pemetaan permasalahan pada lokasi dan isu penelitian. Faktor penghambat yang ditemukan yaitu sisi partisipasi kader akibat kurangnya dana yang mempengaruhi komitmen kader masyarakat, serta belum maksimalnya kesadaran masyarakat Kelurahan Tanjung Mas akan pentingnya pendataan Posyandu.

Faktor Kepentingan Pemerintah

Kepentingan pemerintah dinarasikan terkait bagaimana upaya pemangku pemerintah dalam mencapai tujuan. Kolaborasi dapat mengalami kegagalan karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kolaborasi dapat mengalami kegagalan karena adanya perubahan kesepakatan yang telah disetujui pada awal kesepakatan kerjasama dan munculnya kepentingan baru yang berbeda-beda diantara pemangku kepentingan termasuk para pemimpin masing-masing kelompok (Noor dkk, 2022)

Kepemimpinan inovatif yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Semarang cukup baik dengan

inovasi SiBening, Dapur Sehat, Rumah Pelita, dan Forum Anak. Faktor konsistensi kesepakatan cukup baik pada implementasi KAP berupa Forum Anak setiap 3 minggu sekali sesuai Stranas Stunting serta anggaran yang cukup.

Kepemimpinan inovatif dalam kepentingan pemerintah Kota Semarang telah cukup menjadi faktor pendukung dengan hadirnya SiBening, Dapur Sehat, Rumah Pelita, serta implementasi KAP dengan Forum Anak disetiap kelurahan. Faktor penghambat yang ditemukan yakni implementasi inovasi yang belum optimal ditunjukkan dengan Rumah Pelita khusus Semarang Utara yang memiliki kondisi yang sangat kecil sehingga kurang dapat mengakomodasi kelurahan selain Bandarharjo, serta diresmikannya Rumah Anak Sigap. Kehadiran inovasi dari pemerintah Kota Semarang untuk Kelurahan Tanjung Mas dianggap belum mampu mengatasi kendala faktor alam berupa kendala sanitasi air kotor, banjir, dan rob.

Konsistensi kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi faktor pendukung berupa keberlanjutan penurunan *stunting* dalam implementasi Komunikasi Antar Pribadi dengan Forum Anak setiap 2 minggu sekali, sedangkan faktor penghambat yang ditemukan yakni kendala sanitasi air kotor di Kelurahan Tanjung Mas karena Lurah tidak mampu mengupayakan masyarakat agar menyetujui penyediaan *septic tank* di setiap rumah, serta

kurangnya anggaran yang dilihat dari tidak tersedianya dana untuk tenaga kerja pembangunan *septic tank*. Kendala pembebasan lahan juga menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Faktor Lainnya

Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dari pendanaan *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas menjadi faktor penghambat yang dibuktikan dengan kurangnya pendanaan untuk program PMT yang merupakan program wajib untuk memperbaiki gizi anak *stunting* serta ibu hamil KEK. Kekurangan anggaran tersebut berdampak besar bagi komitmen kader *stunting* serta implementasi program yang belum berjalan dengan maksimal, contohnya aliran kas kader *stunting* sebesar 30% dana PMT tersebut digunakan untuk membuat PMT yang tidak sesuai dengan kandungan gizi yang terdapat pada pedoman menu dari kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan bahwa deskripsi *Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang telah cukup baik dengan susunan hasil analisis secara rinci, sebagai berikut :

1. Kondisi awal menjadikan atensi yang banyak dari multi *stakeholders* menjadikan kondisi awal kolaborasi telah cukup baik, sehingga selama jumlah *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas masih banyak, maka akan tetap menghadirkan keberlanjutan kolaborasi.
2. Desain kelembagaan kolaborasi diwujudkan dalam kejelasan aturan dasar berupa fokus intervensi fokus kelurahan di Kota Semarang serta pembaharuan regulasi berupa Perwal No. 45 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Rembuk *stunting* sebagai perwujudan rapat menyeluruh *stakeholders* di wujudkan secara partisipasi yang inklusif dalam kolaborasi. Eksklusivitas forum kolaborasi dibuktikan dengan setiap kelurahan di Kota Semarang memiliki kolaborasi penanganan *stunting* masing-masing yang terintegrasi dengan SiBening Kota Semarang. Tersedianya publikasi untuk mengawal naik dan turunnya *stunting* secara bulanan di laman resmi Bappeda Kota Semarang.
3. Kepemimpinan fasilitatif pada kolaborasi telah cukup baik dinilai dari pengelolaan bantuan oleh pemerintah kota dan pemerintah perangkat kelurahan dari non TPPS yang tidak berbelit-belit hanya dengan izin kepada Lurah. Keberjalanan mediasi sebagai

wadah perundingan untuk menyusun kesepakatan kolaborasi cukup baik ketiga pimpinan kolaborasi dengan ruang berbeda, yakni Bappeda Kota Semarang, Lurah Tanjung Mas, dan Ketua PKK. Pemberdayaan dalam kolaborasi cukup baik meninjau bentuk penanganan *stunting* dari pemerintah yang bersifat pemberdayaan, keterlibatan Lurah dan Ketua PKK Kelurahan Tanjung Mas untuk menggerakkan pemberdayaan melalui kader *stunting* dari masyarakat dibantu dengan kontribusi *stakeholder* non TPPS.

4. Proses kolaboratif yang memiliki tahapan cukup baik terdapat pada tahapan dialog tatap muka dengan adanya komunikasi mendalam dari *stakeholders* yang melakukan teknis kolaborasi diwujudkan dalam bentuk pertemuan lintas sektor dari Rembuk *Stunting*; pembangunan kepercayaan pemerintah diwujudkan melalui Stranas *Stunting* termuat khusus di setiap wilayah berupa Perwal Kota Semarang No. 45 Tahun 2023 menjelaskan adanya Kolaborasi Lintas Sektor TPPS dan keterbukaan pada pihak non TPPS; dan Hasil antara berupa arah keberlanjutan berupa Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku berupa Forum Anak dijalankan sebagai upaya dalam

mewujudkan perubahan perilaku masyarakat Kelurahan Tanjung Mas sebagai pemberdayaan yang solutif.

Faktor pendukung dan faktor penghambat *Collaborative governance* dalam penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang diidentifikasi sebagai berikut :

A. Faktor Pendukung

1. Struktur jaringan dalam struktur sosial dalam *collaborative governance* mendukung optimalisasi kolaborasi dengan adanya desentralisasi dari pusat ke wilayah Kota Semarang.
2. Faktor kultural telah cukup baik dari sisi SDM non masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas. Komunikasi kolaborasi telah cukup baik dengan adanya interaksi Lurah dengan pihak yang datang untuk menerjunkan bantuan yang tidak harus melakukan prosedur berbelit-belit. Terdapat rutinitas pelaporan dinamika *stunting* setiap bulan dipimpin oleh Ketua PKK. Partisipasi kolaborasi cukup baik dengan keterlibatan bantuan perusahaan, CSR, serta akademisi yang memberikan pengabdian masyarakat.
3. Faktor kepentingan pemerintah pada gagasan yang dihadirkan oleh pemerintah Kota Semarang dalam kepemimpinan inovatif cukup baik dengan hadirnya SiBening, Dapur Sehat, Rumah Pelita, dan

Forum anak. Konsistensi kesepakatan cukup baik dengan implementasi Forum Anak setiap 3 minggu sekali sebagai implementasi Strakom Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. Faktor Penghambat

1. Faktor struktur sosial belum cukup baik dari komitmen sisi masyarakat, termasuk kader *stunting* yang dibuktikan dengan masih ditemukan masyarakat yang sulit menghadiri mediasi *stunting*, sulit menghadiri agenda Posyandu, serta masih banyak masyarakat meremehkan tablet tambah darah saat hamil.
2. Faktor kultural berupa SDM sisi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas karena masih ditemukan banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran pentingnya pola asuh dan pemahaman gizi yang baik akibat wilayah yang kumuh dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan banyak masyarakat melakukan pernikahan anak demi ketahanan keluarga. Partisipasi kolaborasi dari komitmen kader *stunting* belum baik karena kurangnya pendanaan serta minimnya kesadaran masyarakat untuk mengajak anaknya ke Posyandu setiap bulan dan melakukan mediasi *stunting* setiap bulannya.

3. Faktor kepentingan pemerintah dalam kepemimpinan fasilitatif dalam implementasinya belum cukup untuk mengatasi permasalahan faktor alam berupa kendala sanitasi, banjir, dan rob. Konsistensi kesepakatan untuk perbaikan sanitasi di Kelurahan Tanjung Mas belum cukup baik karena pemerintah belum mampu mengupayakan masyarakat untuk menyetujui penyediaan *septic tank* di setiap rumah dan menyelesaikan permasalahan lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maflahah, I. (2019). Analisis Status Gizi Balita di Kabupaten Sumenep Madura. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 12(1), 35-47.
- Ekayanthi, N. W. D., & Suryani, P. (2019). Edukasi gizi pada ibu hamil mencegah stunting pada kelas ibu hamil. *Jurnal Kesehatan*, 10(3), 312-319.
- World Health Organization. (2021). Levels and trends in child malnutrition: UNICEF.
- Mauludiyah, E. R., Handriyantini, E., & Nurfitri, R. (2022). Perancangan Motion Graphic Pola Makan Ibu Hamil Sebagai Bahan Sosialisasi Stunting Desa Jambearjo. *Jurnal Desain Komunikasi Visual Asia*, 6(01), 52-64.
- Alderman, H., Nguyen, P. H., & Menon, P. (2019). Progress in reducing child mortality and stunting in India: an application of the Lives Saved Tool. *Health Policy and Planning*, 34(9), 667-675.

<https://www.undp.org/sustainable-development-goals>

Pranita, Ellyvon (2021). Kasus Stunting Terbanyak, Indonesia Tempati Urutan Keempat Dunia. Bestari Kumala Dewi, ed. Kompas.com, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/19/090300723/kasus-stunting-terbanyak-indonesia-tempati-urutan-keempat-dunia?page=all> diakses pada 24 Juni 2023

Goalkeepers by Gates Foundation <https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2020-report/progress-indicators/stunting/> diakses pada 24 Juni 2023

Tarmizi, Siti Nadia (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. sehatnegeriku.kemkes.go.id. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20230125/3142280/prevalensi-stunting-di-indonesia-turun-ke-216-dari-244/> diakses pada 24 Juni 2023

Anugrah P., Alfian (2021). Penyuluhan Sosial dalam Pencegahan “Stunting” Pada Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia. [Kemensos.go.id](https://www.kemensos.go.id), <https://www.kemensos.go.id/penyuluhan-sosial-dalam-pencegahan-stunting-pada-anak> diakses pada 24 Juni 2023

Dinkes. 2023. Pilot Project Pemberian PMT Balita Stunting dan Ibu Hamil di Kelurahan Tanjungmas. Diakses pada 30 Agustus 2023 dari <https://stunting.semarangkota.go.id/blog/Pilot-Project-Pemberian-PMT-Balita-Stunting-dan-Ibu-Hamil-di-Kelurahan-Tanjungmas>

BKKBN. 2021. Luncurkan DASHAT, BKKBN Perkuat Strategi Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Diakses pada 30 Agustus 2023 dari <https://jabar.bkkbn.go.id/?p=3288>

Dinkes. 2023. Wisata Edukasi Gizi di Rumah Pelangi Nusantara. Diakses pada 30 Agustus 2023 dari <https://stunting.semarangkota.go.id/blog/Wisata-Edukasi-Gizi-di-Rumah-Pelangi-Nusantara>

Perda Kota Semarang No. 07 Tahun 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang.

Keputusan Walikota Nomor 045/V/2022 Tahun 2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Semarang

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Perwali Kota Semarang No. 45 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang

Keputusan Walikota No. 050/365/V/2022 Tentang Penetapan Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan Stunting di Kota Semarang

Candriasih, P., Ndama, M., & Awusi, H. A. (2021). Family Assistance Program With Interprofessional Education Approach In Labuan Panimba: Program Pendampingan Keluarga Dengan Pendekatan Interprofesional Edukasi Di Labuan Panimba. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Svasta Harena*, 1(1), 14-18.

Rudi, R. (2021). Kolaborasi dalam Program Inovasi Delivery Passport Service di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar=

Collaboration in the Delivery Passport Service Innovation Program at the Makassar City Immigration Office Class I (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Luwu Utara.

Indri Erkaningrum, F. (2015). Collaborative governance: daya upaya perguruan tinggi merealisasikan harapan pemangku kepentingan. *Sumber:* www.academia.edu/34825788/COLLABORATIVE_GOVERNANCE.pdf, diakses, 5.

Trisniati, E., Cadith, J., & Nugroho, K. S. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. *Jurnal Governansi*, 8(1), 59-68.

Islamy, La Ode S. (2018). Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: CV. Budi Utama

MAHARANI, N. (2022). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Sepriandi, S., & Hussein, R. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance dalam Penanganan Pekerja Migran Bermasalah di Kota Tanjungpinang Factors Affecting Collaborative Governance in Handling Deprived Migrant Workers in Tanjungpinang City. *Sumber*, 201(30,661), 15-1.

Sepriandi, Sigit, 2019. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Social Politik MUA Vol 7 No 1*

Septiani, E., & Muhammadiyah, m. Faktor Pendukung Dan Penghambat